



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAPUA,
PAPUA BARAT DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIAK**

JALAN ADIBAI SUMBERKER NO. 1, BIAK NUMFOR 98117, KOTAK POS 216
TELEPON (0981)25120; FAKSIMILE (0981)23681; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIAK**

LAP-10/KPP.1808/2025

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang dilimpahkanNya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak dapat diselesaikan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menyusun LAKIN Tahun Anggaran 2024 ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014) ditentukan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN). Untuk pelaksanaan penyusunan LAKIN Tahun Anggaran 2024, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyampaikan Nota Dinas nomor ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau sasaran strategis instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna sehingga perlu banyak masukan dari berbagai pihak, namun demikian kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi serta gambaran yang jelas bagi semua pihak yang berkepentingan.

Biak, 24 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Calvin Octo Pangaribuan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LAKIN merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau sasaran strategis instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menyusun LAKIN Tahun Anggaran 2024 ini sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak beralamat di Jalan Adibai Sumberker Samofa Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Kantor ini menempati sebidang tanah seluas 20.020 meter persegi dengan bangunan seluas 1.500 meter persegi. Sebelumnya gedung ini merupakan gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Biak yang dibangun pada tahun 1999. Bangunan kantor terdiri dari dua gedung, yaitu Gedung A dan Gedung B yang setiap gedungnya merupakan bangunan dua lantai.

Sebelum adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 yang mengatur tentang perubahan atas organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, penatausahaan perpajakan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak dilaksanakan oleh dua Kantor Pajak yaitu KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) Biak yang merupakan bagian dari Kantor Pelayanan Pajak Timika dan KP PBB Biak. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-195/PJ/2008 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas, maka sejak 1 Desember 2008 dua kantor tersebut resmi dilebur menjadi sebuah kantor perpajakan dengan sistem administrasi modern yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak.

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak meliputi enam Kabupaten yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Dogiyai serta satu Provinsi yaitu Provinsi Papua Tengah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Biak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelayanan pajak;
2. Penyuluhan pajak;
3. Pemberian dan/atau penghapusan nomor pokok wajib pajak;
4. Pengukuhan dan/atau pencabutan pengusaha kena pajak;
5. Penatausahaan data perpajakan, penempatan penyimpanan dokumen dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
6. Pengawasan kepatuhan wajib pajak;
7. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
8. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
9. Pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
10. Pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan;
11. Pemeriksaan pajak;
12. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
13. Penyelesaian permohonan konfirmasi status wajib pajak;
14. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
15. Pengurangan pajak bumi dan bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
16. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
17. Pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
18. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
19. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
20. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
21. Pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak sendiri terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;

6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Kelompok Jabatan Fungsional;
11. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Serui; dan
12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Nabire.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 63 orang pegawai yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa komposisi, yaitu:

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak Berdasarkan Jabatan		
No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Kantor	1
2.	Kepala Seksi, Kepala Subbag dan Kepala KP2KP	11
3.	Fungsional Pemeriksa Pajak	5
4.	Fungsional Penyuluh	2
5.	Account Representative	20
6.	Juru Sita	1
7.	Bendaharawan	1
8.	Sekretaris	1
9.	Pelaksana	21

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Sekolah Menengah Atas	1
2.	Diploma I	16
3.	Diploma III	20
4.	Sarjana/Diploma IV	17
5.	Pasca Sarjana	9

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak Berdasarkan Tingkat Golongan		
No.	Tingkat Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan I	0

2.	Golongan II	30
3.	Golongan III	29
4.	Golongan IV	4

C. Sistematika Laporan

Berikut adalah susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkatnya:

1. Kata Pengantar

Bagian ini memuat ucapan terima kasih atau pengantar singkat mengenai penyusunan laporan serta harapan atau apresiasi kepada pihak yang mendukung.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tugas, fungsi dan struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak. Pendahuluan memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini memuat perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini berisi tentang capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta evaluasi peningkatan akuntabilitas kinerja.

5. Bab IV Penutup

Bagian ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya. Hal-hal yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam periode lima tahun mendatang tertuang dalam Renstra Tahun 2020 – 2024. Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a) Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; dan
 - c) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-467/KMK/2014 tentang pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

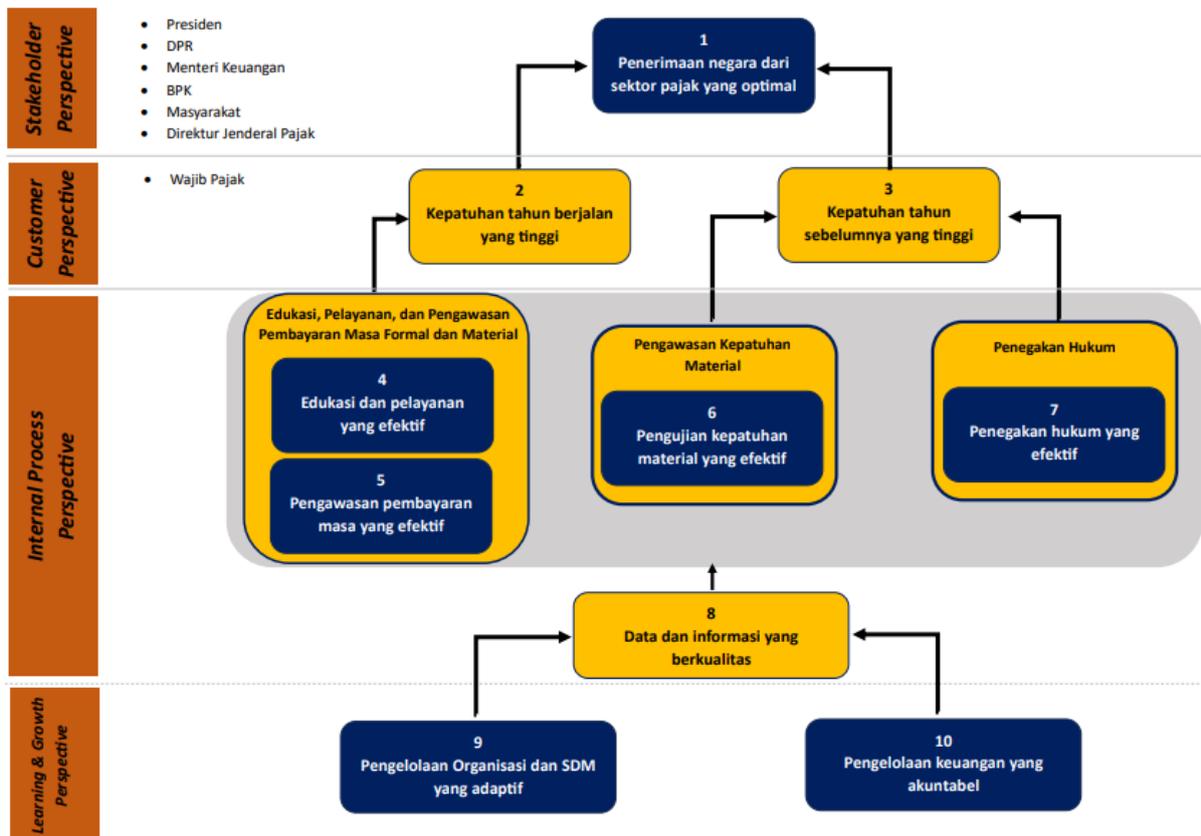
Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis (SS) yang harus dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak.

Sasaran strategis (SS) yang harus dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Sasaran strategis tersebut yaitu:

1. *Stakeholder Perspective*
 - a) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.

2. *Customer Perspective*
 - a) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
 - b) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.
3. *Internal Process Perspective*
 - a) Edukasi dan pelayanan yang efektif;
 - b) Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
 - c) Pengawasan kepatuhan material yang efektif;
 - d) Penegakan hukum yang efektif;
 - e) Data dan informasi yang berkualitas.
4. *Learning & Growth Perspective*
 - a) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
 - b) Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Peta Strategi dan IKU 2024 Kemenkeu-One DJP



Dari peta strategi Direktorat Jenderal Pajak tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak mencapai 10 sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama yang diidentifikasi sebanyak 20 IKU.

Keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a- CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100
		06c-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100

		08a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sejalan dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN Tahun 2024 menggunakan formulir Pengukuran Kinerja yang memuat pencapaian indikator-indikator kinerja utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak Tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan dimaksud.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak tahun 2022 dapat terlihat dari 11 sasaran strategis yang masing-masing pencapaian Indikator Kinerja Utama nya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30.00%	113.65
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							113.65
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	138.01%	Max	E/M	21%	60.00%	120.00
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100.00%	104.12%	Max	P/M	14%	40.00%	104.12
Customer Perspective							20.00%	119.53
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							119.06
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	118.12%	Max	P/M	14%	50.00%	118.12
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	139.23%	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							120.00
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	128.88%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
Internal Process Perspective							25.00%	116.97
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							117.96
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67.00%	84.00%	Max	P/M	14%	40.00%	120.00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	80%	93.28%	Max	E/M	21%	60.00%	116.60
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							116.72
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	105.05%	Max	P/M	14%	100.00%	116.72
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							110.17
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	35.90%	120.00
6b-N	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak	100.00%	108.33%	Max	P/M	14%	35.90%	108.33
6c-N	Persentase penyampaian IDLP	100.00%	100.00%	Max	P/H	11%	28.21%	100.00
7	Penegakan hukum yang efektif							120.00
7a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40.00%	57.48%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	117.43%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
7c-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80.00%	117.78%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	138.04%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00

Learning & Growth Perspective								25,00%	106,59
9	SDM yang kompeten							120,00	
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	75,00%	96,67%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00	
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							107,32	
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	90,00%	95,00%	Max	P/H	11%	32,35%	106,48	
10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	85,00%	89,99%	Max	P/M	14%	41,18%	105,87	
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90,00%	99,53%	Max	A/M	9%	26,47%	110,59	
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							92,46	
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	88,30%	Max	P/M	14%	100,00%	92,46	
Nilai Kinerja Organisasi								113,89	

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak tahun 2023 dapat terlihat dari 11 sasaran strategis yang masing-masing pencapaian Indikator Kinerja Utama nya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective								30,00%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							110,60
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	111,67%	Max	E/L	26%	50,00%	111,67
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	109,53%	Max	E/L	26%	50,00%	109,53
Customer Perspective								20,00%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							111,72
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,81%	Max	P/L	19%	42,22%	100,81
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	119,70%	Max	E/L	26%	57,78%	119,70
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							49,02
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	49,02%	Max	E/M	21%	100,00%	49,02
Internal Process Perspective								25,00%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							109,35
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	84,00%	Max	P/M	14%	40,00%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81%	82,82%	Max	E/M	21%	60,00%	102,25
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,33%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	115,50%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	94,84%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							116,51
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	125,48%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	62,67%	Max	P/L	19%	57,58%	113,95
Learning & Growth Perspective								25,00%
9	SDM yang kompeten							120,00
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	77,00%	98,10%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							109,19
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	94,81%	Max	P/M	14%	50,00%	111,54
10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	96,16%	Max	P/M	14%	50,00%	106,84
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							99,59
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,0%	99,59%	Max	P/M	14%	100,00%	99,59
Nilai Kinerja Organisasi								105,95

3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak tahun 2024 dapat terlihat dari 10 sasaran strategis yang masing-masing pencapaian Indikator Kinerja Utama nya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	102,41
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,41
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	101,47%	Max	E/L	26%	57,78%	101,47
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,70	Max	P/L	19%	42,22%	103,70
Customer Perspective							20,00%	102,62
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,86
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	101,54%	Max	E/L	26%	57,78%	101,54
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	109,40%	Max	P/L	19%	42,22%	109,40
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,39
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,39%	Max	E/M	21%	100,00%	100,39
Internal Process Perspective							25,00%	116,21
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,43
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,86%	Max	E/M	21%	50,00%	106,86
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,74%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							114,90
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	111,82%	Max	P/M	14%	33,33%	111,82
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	112,89%	Max	P/M	14%	33,33%	112,89
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,86%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	96,87%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,10
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,34	Max	P/M	14%	33,33%	117,34
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,64	Max	P/M	14%	33,33%	113,69
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,45	Max	P/M	14%	33,33%	108,28
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,44

4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berikut ini adalah evaluasi dan analisis kinerja di KPP Pratama Biak tahun 2024 yang dijabarkan menurut sasaran strategis masing-masing:

1) Sasaran Strategis: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

(a) 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Pada awal tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target penerimaan pajak sebesar Rp769.001.418.166. Namun, seiring berjalannya waktu, target tersebut mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

(1) Perubahan Target Pertama

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku nomor KEP-356/WPJ.18/2024 tentang

Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku nomor KEP-80/WPJ.18/2024 tentang Revisi atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku Nomor KEP-75/WPJ.18/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Biak mendapat penambahan target menjadi Rp817.996.045.000.

(2) Perubahan Target Kedua

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku nomor KEP-519/WPJ.18/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku Nomor KEP-517/WPJ.18/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku Nomor KEP-356/WPJ.18/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Papua, Papua Barat, dan Maluku Nomor KEP-80/WPJ.18/2024 tentang Revisi atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku nomor KEP-75/WPJ.18/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahun Anggaran 2024, terjadi perubahan target menjadi Rp811.924.469.000.

Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak telah berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi target tersebut. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Persentase realisasi penerimaan pajak merupakan indikator untuk menilai kinerja KPP Pratama Biak, apakah dengan sumber daya yang telah ditentukan dapat/tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target penerimaan yang telah diamanahkan. Hal ini dapat terlihat pada capaian realisasi penerimaan 101,47% atau sebesar Rp823.866.159.433.

(b) 1b-CP Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 100%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan. Hal ini dapat terlihat dengan capaian realisasi 103,70%

2) Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

(a) 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar Rp761.018.727.000. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan capaian realisasi 101,54% atau sebesar Rp772.760.364.916.

(b) 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 24.103 SPT. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan capaian realisasi 109,40% atau sebanyak 28.958 SPT.

3) Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

(a) 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp50.905.742.000. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan capaian realisasi 100,39% atau sebesar Rp51.105.794.517.

4) Sasaran Strategis: Edukasi dan pelayanan yang efektif

(a) 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 74%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan capaian realisasi 88,80%.

(b) 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target efektivitas penyuluhan dan pelayanan sebesar 100%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan capaian realisasi 106,86%.

5) Sasaran Strategis: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

(a) 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target pengawasan pembayaran masa sebesar 90%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan capaian realisasi 118,74%.

6) Sasaran Strategis: Pengawasan kepatuhan material yang efektif

(a) 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 100%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan capaian realisasi 111,82%.

(b) 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target pemeriksaan data selain tahun berjalan sebesar 100%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak

selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan capaian realisasi sebesar 120%.

(c) 6c-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 100%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan capaian realisasi sebesar 112,89%.

7) Sasaran Strategis: Penegakan hukum yang efektif

(a) 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebesar 100% dengan komposisi target efektivitas pemeriksaan sebesar 60% dan target efektivitas penilaian sebesar 40%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan realisasi sebesar 68,87% untuk efektivitas pemeriksaan dan 80,04% untuk efektivitas penilaian. Capaian akhir dari tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tersebut adalah 120%.

(b) 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target efektivitas penagihan sebesar 75%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan realisasi sebesar 108,86% dan capaian sebesar 120%.

(c) 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan sebesar 100%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan realisasi dan capaian sebesar 100%.

8) Sasaran Strategis: Data dan Informasi yang berkualitas

(a) 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target produksi data potensi pajak berbasis lapangan sebesar 100%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan dengan capaian 120%.

(b) 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target data regional dari ILAP sebesar 55%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan dengan realisasi sebesar 96,87% dan capaian sebesar 120%.

9) Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

(a) 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sebesar 100%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan realisasi dan capaian sebesar 117,34%.

(b) 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target penilaian integritas unit sebesar 185%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan realisasi sebesar 96,64% dan capaian sebesar 113,69%.

(c) 09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 90%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk

memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan realisasi sebesar 97,45% dan capaian sebesar 108,28%.

10) Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

(a) 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menerima target kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 100%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan realisasi sebesar 120% dan capaian sebesar 120%.

5. Rencana Aksi Tahun 2025

Untuk menghadapi tahun 2025, KPP Pratama Biak telah menyusun beberapa rencana aksi, yaitu:

- 1) Melakukan komunikasi intensif melalui sarana komunikasi baik secara langsung maupun secara daring untuk melakukan penggalan potensi;
- 2) Melakukan visit kepada Wajib Pajak yang berpotensi;
- 3) Memfokuskan penggalan potensi terhadap sektor-sektor prioritas nasional dan regional seperti perdagangan;
- 4) Melakukan pengawasan pajak atas dana desa dan sosialisasi secara intensif terhadap penggunaan dana desa kepada desa/kampung;
- 5) Menyusun analisa risiko rencana pengawasan Wajib Pajak yang belum pernah melakukan pembayaran;
- 6) Menghubungi Wajib Pajak tersebut secara langsung *via* telepon ataupun media komunikasi lainnya dan menghimbau untuk dilakukan pelaporan SPT Tahunan;
- 7) Menerbitkan surat teguran bagi Wajib Pajak yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan yang sudah jatuh tempo;
- 8) Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk menemukan alamat Wajib Pajak risiko tinggi pada CRM;
- 9) Menindaklanjuti setiap data yang mempunyai potensi untuk dilakukan pengusulan;
- 10) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak ketiga diantaranya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Bank Persepsi;
- 11) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 015 digunakan untuk pembiayaan Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan berupa:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pembiayaan terkait pemenuhan kebutuhan perkantoran yang berhubungan dengan karyawan yang terdiri dari belanja gaji pokok, pembulatan gaji, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan PPh, tunjangan beras, tunjangan uang makan, tunjangan umum dan belanja tunjangan khusus papua.

Realisasi anggaran sehubungan dengan penggunaan anggaran terkait dengan anggaran belanja pegawai sebesar Rp566.519.000 dengan uraian capaian per mata anggaran sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Uang Makan PNS	559.736.000	509.318.000
Belanja Uang Lembur	93.536.000	57.201.000
Jumlah	653.272.000	566.519.000

2) Belanja Barang

Belanja barang digunakan untuk pembiayaan terkait pemenuhan kebutuhan perkantoran yang terdiri dari belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas/pos pusat, belanja honorarium satuan kerja, belanja barang operasional, belanja energi (listrik dan air), belanja langganan telepon, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta belanja perjalanan dinas.

Realisasi anggaran sehubungan dengan penggunaan anggaran terkait dengan anggaran belanja barang menjadi sebesar Rp8.068.675.300 dengan uraian capaian per mata anggaran sebagai berikut:

Belanja Barang	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang Operasional		
Belanja Keperluan Perkantoran	2.321.562.000	2.301.162.711
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12.000.000	9.023.000
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	487.585.000	480.398.876
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	86.904.000	86.904.000
Jumlah	2.908.051.000	2.877.488.587

Belanja Barang Non Operasional		
Belanja Bahan	601.476.000	473.647.449
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	132.000.000	119.946.700
Jumlah	733.476.000	593.594.149
Belanja Barang Persediaan		
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	498.190.000	472.259.590
Jumlah	498.190.000	472.259.590
Belanja Jasa		
Belanja Langganan Listrik	430.900.000	398.400.271
Belanja Langganan Telepon	89.100.000	87.716.648
Belanja Langganan Air	18.682.000	15.068.210
Belanja Sewa	280.994.000	266.230.000
Belanja Jasa Profesi	53.760.000	35.900.000
Belanja Jasa Lainnya	6.680.000	3.587.800
Jumlah	880.116.000	806.902.929
Belanja Pemeliharaan		
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	618.605.000	595.800.550
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	313.910.000	292.778.471
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000	27.071.650
Jumlah	962.515.000	915.650.671
Belanja Perjalanan Dalam Negeri		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.366.994.000	2.340.829.374
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	137.080.000	61.950.000
Jumlah	2.504.074.000	2.402.779.374
Jumlah Belanja Barang	8.486.422.000	8.068.675.300

C. Hasil Tahun 2024

Pada Tahun 2024, KPP Pratama Biak mencapai hasil sebagai berikut:

- 1) Mencapai target penerimaan yang diamanahkan dengan realisasi 101,47% dari target yang ditetapkan atau nominal sebesar Rp823.866.159.433;
- 2) Peningkatan tingkat penyelesaian SP2DK;
- 3) Telah dilakukan pengusulan pemeriksaan;
- 4) Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebanyak 26.369 SPT atau mencapai realisasi 109,40% dari Target Wajib SPT yang ditetapkan;
- 5) Pengawasan data atas tahun berjalan telah tercapai;
- 6) Meningkatnya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas belanja dana desa di enam kabupaten wilayah KPP Pratama Biak;

- 7) Telah dilakukan usulan prioritas pengawasan pada DPP dengan berdasarkan pada analisis risiko (CRM IRE).

D. Hambatan Tahun 2024

Hambatan yang dialami KPP Pratama Biak dalam menjalankan rencana aksi antara lain:

- 1) Capaian realisasi dari aktivitas yang menumpuk di akhir periode menyebabkan ritme pekerjaan menjadi tidak seimbang;
- 2) Kemampuan bayar Wajib Pajak rendah;
- 3) Sebagian Wajib Pajak yang tidak kooperatif;
- 4) Mayoritas Wajib Pajak yang masuk DPP adalah Wajib Pajak Konstruksi Rekanan Pemerintah;
- 5) Wajib Pajak Orang Pribadi Meninggal Dunia dan Ahli Warisnya tidak responsif dalam menyampaikan SPT terkait;
- 6) Wajib Pajak berada di Wilayah Red Zone (Kabupaten Dogiyai);
- 7) Beberapa Wajib Pajak memiliki karakter menyampaikan SPT lewat batas waktu;
- 8) Keterlambatan Penerbitan Bukti Potong dari Pemda;
- 9) Pemda tidak menyerahkan bukti potong ke pegawainya;
- 10) Minimnya pengetahuan pemberi kerja dan pegawai terkait;
- 11) Kondisi Geografis yang sulit.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut.

1. Letak geografis di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak yang tersebar di 6 kabupaten dan akses yang kurang memadai menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan penerimaan maupun kepatuhan pelaporan;
2. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan dengan masing-masing Pemerintah Daerah yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Biak.
3. Pengawasan kewajiban bendahara SKPD dan Bendahara Desa diperketat dengan meneliti kebenaran materiil perhitungan pajak yang dipotong;
4. Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan dan kehumasan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan;
5. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemanfaatan data;
6. Menambah kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga dalam bidang pengamanan penerimaan Negara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak Tahun 2024 ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Calvin Octo Pangaribuan

